

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEREMPUAN DALAM PILKADA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020

Susi Murniwati¹ dan Leni Nurul Kariyani*¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa
leni.nurul.kariyani@uts.ac.id

ABSTRAK

Pilkada di kabupaten Sumbawa dari tahun 2010, 2015 dan 2020 selalu mengalami peningkatan jumlah pemilih dengan jumlah pemilih perempuan selalu lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki, pada Pilkada tahun 2020 pemilih perempuan sebanyak 170.780 orang dan pemilih laki-laki sebanyak 166.365 orang. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik pemilih perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dan factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik Budiardjo dengan indicator yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method atau penelitian campuran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan partisipasi politik perempuan dalam pilkada 2020 berdasarkan empat indicator yaitu: (1) memberikan suara dalam pemilihan (2) menghadiri rapat umum (3) menjadi anggota suatu partai (4) mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen sudah cukup tinggi dalam memberikan suara dalam pemilihan umum dan menjadi anggota suatu partai dan masih sangat kurang dalam menghadiri rapat umum dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Adapun factor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan adalah kesadaran politik dan adanya dorongan dari pejabat pemerintah.

Kata kunci: Partisipasi politik, Perempuan, Pilkada.

ABSTRACT

Pilkada in Sumbawa district from 2010, 2015 and 2020 has always experienced an increase in the number of voters with the number of female voters always more than the number of male voters, in the 2020 Pilkada there were 170,780 female voters and 166,365 male voters. So the purpose of this study is to determine the level of political participation of women voters in the 2020 regional elections in Sumbawa Regency and the factors that influence the political participation of women voters. The theory used in this research is Budiardjo's political participation theory with indicators namely voting in general elections, attending general meetings, becoming a member of a party and holding relations with government officials or members of parliament. The type of research used in this study is a mixed method or mixed research. Data collection techniques used are questionnaires, observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this study show that women's political participation in the 2020 local elections is based on four indicators, namely: (1) voting in elections (2) attending general meetings (3) being members of a party (4) establishing a relationship with government officials or members of parliament is high enough in voting in general elections and becoming a member of a party and still lacking in attending public meetings and making contact with government officials or members of parliament. The factors that influence women's political participation are political awareness and encouragement from government officials.

Keywords: Political participation, Women, Pilkada.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan tindakan masyarakat yang ditujukan untuk mempengaruhi ketentuan politik. Partisipasi politik dilaksanakan oleh masyarakat, bukan melalui politisi atau PNS. Partisipasi politik ini bersifat bebas dan tidak diatur oleh negara atau partai yang memiliki kekuasaan. Partisipasi politik merupakan aktivitas individu atau banyak orang yang antusias ikut serta dalam kehidupan politik, misalnya untuk memilih kepala negara dan mempengaruhi peraturan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas itu meliputi, misalnya, memberi suara dalam pemilihan, berpartisipasi dalam rapat umum, berhubungan dengan atau melobi pejabat pemerintah atau anggota parlemen, bergabung dengan partai politik atau gerakan sosial, dll. (Budiarjo dalam Sahya, 2013)

Pemilihan umum dianggap sebagai salah satu alat demokrasi, yang secara konseptual cocok untuk memperjelas konsep abstrak kedaulatan rakyat. Hasil pemilihan yaitu individu-individu yang dipilih untuk mewakili rakyat dan bekerja untuk rakyat. Proses pemilihan pemimpin melibatkan sebanyak mungkin orang dalam pemilihan pemimpin dengan pemilihan secara langsung maupun pemilihan terbatas. Oleh karena itu, pemilihan umum adalah pintu perubahan yang mengarah pada manusia yang menghasilkan kepala negara atau daerah yang mempunyai kemampuan merumuskan kebijakan yang tepat dengan cara kolektif untuk meningkatkan posisi rakyat. Karena pemilu adalah sarana untuk mengubah pemimpin, maka sudah pasti harus diawasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam semua tingkatan pemilihan begitu diperlukan. Masyarakat harus lebih tanggap dan menyadari bahwa suara yang diberikannya menentukan nasibnya nanti. Memberikan suara mempunyai poin penting dalam mutu demokrasi untuk memperbaiki takdir sendiri (Rahmawati & Muhlim, 2016)

Keterbatasan partisipasi perempuan dalam pemerintahan daerah bisa mengakibatkan keperluan yang tidak terpenuhi, kekhawatiran wanita yang tidak teratasi, dan pembangunan utama yang tidak seimbang dalam perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan pembatasan wanita dalam akses ke layanan sosial di tingkat lokal. Minimnya momen untuk berperan penting dalam pemerintahan lokal berdampak buruk terhadap kesempatan wanita untuk menduduki posisi senior dalam politik daerah dan negara bagian. Saat ini, partisipasi politik perempuan semakin ditekankan untuk mengintegrasikan kebutuhan kesetaraan ke dalam beragam peraturan umum dan

menciptakan alat hukum yang peka terhadap gender yang selama ini diabaikan sehingga menahan kemajuan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Pemilu bukan hanya pilihan wakil rakyat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi elit politik perempuan untuk menentukan bentuk partisipasi lain. Yang mendasari hal ini adalah sifat manusia yang mempunyai kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri untuk menentukan, menerapkan, dan menguji metode, prosedur, dan alat untuk mencapai tujuan ini.

Wanita yang mempunyai kemampuan politik yang cukup umumnya terlibat pada kegiatan lobi atau berperan netral. Banyak wanita di Indonesia tidak menyadari kemampuan mereka untuk memengaruhi mutu demokrasi di negara ini. Lalu, mereka kurang memiliki ilmu dan keahlian dalam memakai hak politik mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak berbicara tentang pemilihan umum atau politik. Sehingga, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam majelis legislatif yang memengaruhi hak mereka, dan mereka tidak diwakili dengan baik dalam badan pembuat keputusan. Sebagai contoh lemahnya partisipasi perempuan dalam politik (partisipasi parlementer). Meski kini banyak perempuan yang berperan di ranah publik, namun kebanyakan terbatas pada kuantitas, apalagi kualitas. Meskipun demikian, jika ada kebijakan positif yang mensyaratkan 30 persen partisipasi perempuan, itu hanya sebatas keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, perempuan hampir tidak bisa mengomentari kualitas representasi dalam proses pengambilan keputusan. Maka agenda yang mendesak adalah mengedepankan kesetaraan gender jika ingin berkembang menjadi demokrasi yang benar-benar berjalan dan mencapai tujuan sosial, politik dan ekonominya.

Kabupaten Sumbawa adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kecamatan sebanyak 24 kecamatan. Dari Pilkada tahun 2010 sampai Pilkada 2020 jumlah pemilih selalu meningkat dimana pada setiap Pilkada jumlah pemilih perempuan selalu lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih laki-laki seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Pemilih pada Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2010, 2015 dan 2020

Jumlah pemilih dalam Pilkada 2020, lebih banyak dibandingkan Pilkada tahun 2010 dan 2015 begitupun dengan tingkat partisipasi pemilihnya dimana tahun 2020 memiliki tingkat partisipasi tertinggi disbanding Pilkada sebelumnya yaitu mencapai 82,4%, sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2010 dan 2015 mencapai 71,54% dan 75,75%. Adapun sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai DPT di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, seperti yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2 Jumlah DPT Setiap Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2010	151.082	154.101	305.183
2015	162.273	164.561	326.834
2020	166.365	170.780	337.145

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Alas	10.674	11.326

2	Alas Barat	8.008	8.277
3	Batu Lanteh	4.410	3.938
4	Buer	5.358	5.916
5	Empang	8.815	9.147
6	Labangka	4.172	4.117
7	Labuhan Badas	10.917	11.300
8	Lantung	1.270	1.303
9	Lape	6.663	6.620
10	Lenangguar	2.777	2.681
11	Lopok	7.184	7.579
12	Lunyuk	7.383	7.068
13	Maronge	4.039	4.149
14	Moyo Hilir	9.296	9.894
15	Moyo Hulu	8.560	8.933
16	Moyo Utara	3.994	4.127
17	Orong Telu	1.963	1.814
18	Plampang	1.349	11.339
19	Rhee	2.955	2.988
20	Ropang	2.307	2.225
21	Sumbawa	18.664	19.771
22	Tarano	6.095	6.159
23	Unter Iwes	7.894	7.979
24	Utan	11.605	12.143

Berdasarkan hasil Observasi awal peneliti dari salah satu tokoh masyarakat, menilai pilpub tidak terlalu punya dampak ke kehidupan terutama Perempuan, banyak dari mereka pun bersifat apatis dan minim tentang pendidikan politik sehingga lebih memilih memanfaatkan waktu pemugutan suara untuk berlibur atau dirumah mengerjakan pekerjaan rumah ketimbang ketempat pemungutan suara (TPS). Perbedaan Pemilih Laki-laki dan Perempuan tidak ada perbedaan karena mereka mempunyai hak untuk memilih dan menentukan pilihannya sedangkan laki-laki lebih aktif dari perempuan karena mereka menganggap bahwa perempuan lebih baik di belakang laki-laki, sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai faktor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hampir setiap kecamatan pemilih perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki. Namun apakah partisipasi politik

perempuan dalam pemilihan kepala daerah berbanding lurus dengan jumlah pemilih perempuan yang ada dalam data? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan? Melihat hal ini peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Bupati tahun 2020, juga dikarenakan kebanyakan perempuan lebih memilih melakukan hal lain daripada ikut berpartisipasi dalam pemilihan, dalam hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk berpartisipasi menurun. Banyak masyarakat yang beranggapan ikut atau tidak ikut dalam berpartisipasi politik yaitu mencoblos pada pemilihan Bupati tidak akan mempengaruhi kehidupan pribadi ataupun kehidupan keluarga.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi politik pemilihan perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik pemilih perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dan untuk mengetahui apa factor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

Menurut Sukma (2018) Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan tingkat partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan Politik merupakan berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuannya tersebut. Dapat di observasi keterlibatan dari seluruh masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting untuk mengarahkan atau memberi masukan setiap kebijakan politik di suatu daerah. Namun, tidak semua pelaksanaan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak juga kontroversi-kontroversi mengenai keterlibatan masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.

Menurut Miriam Budiardjo (2013) Dalam pemilihan umum, pemilih memilih partai yang dianggap mampu mewakili suara dan aspirasinya. Semakin banyak pihak yang memilih sebuah partai, semakin besar kesempatan partai tersebut untuk terpilih. Partisipasi politik meliputi berbagai kegiatan, seperti memberikan suara dalam pemilihan, terlibat dalam kampanye pemilihan, bergabung dengan partai politik, menjalin hubungan dengan kepala negara, anggota parlemen, dan sebagainya.

Menurut Surbakti (dalam Raden, 2019) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah:

1. Kesadaran politik adalah pemahaman akan hak dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan kepedulian individu pada lingkungan dan politik yang dihadapinya. Ini melibatkan pengetahuan tentang lingkungan sosial dan politik.
2. Keyakinan pada pemerintah adalah evaluasi terhadap apakah pemerintah dapat dipercaya atau tidak. Jika pemerintahan sebelumnya dianggap tidak dapat memenuhi keinginan rakyat, maka partisipasi politik rakyat pada pemilu berikutnya akan terpengaruh.

B. Politik Gender

Menurut Rasyidin (2016) Gender adalah konstruksi budaya dalam suatu Negara yang dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, agama dan lingkungan etnis. Jenis kelamin bukan gender, namun jenis kelamin dapat terjadi pada pria maupun wanita. Dari situasi yang ada sekarang ini gender menimbulkan berbagai interpretasi dan arti yang belum sepenuhnya memahami gender itu sendiri. Bila diamati masih terjadi ketidakpahaman mengenai pengertian gender dalam hubungannya dengan usaha pembebasan wanita. Di antara penyebab terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpahaman tersebut adalah perbedaan perspektif dalam mendefinisikan gender, baik dalam masyarakat umum maupun di kalangan para peneliti gender itu sendiri.

Menurut Umar (dalam Remiswal, 2013) Penjelasan teori gender terkait dengan dampak perbedaan biologis pada peran dan fungsionalitas seseorang dalam masyarakat. Teori gender memiliki dua komponen utama: sifat (nature) dan pengasuhan (nurture). Teori

gender dibentuk dari dua aliran utama ini. Sifat menekankan bahwa perbedaan peran gender antara pria dan wanita adalah kodrat, sedangkan pengasuhan berpendapat bahwa perbedaan rasio jenis kelamin antara pria dan wanita ditentukan bukan oleh faktor biologis tetapi oleh konstruksi sosial.

Partisipasi perempuan yang rendah dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan menunjukkan bahwa hal itu dapat dikaitkan dengan institusi yang ada. Keterbatasan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik Indonesia terjadi akibat bentuk politik otoriter Orde Baru (ORBA). Hubungan antara perempuan dan laki-laki merupakan hasil konstruksi sosial yang mempengaruhi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Interaksi alamiah ini berkembang menjadi sistem sosial yang tersendiri, membentuk sistem monopolistik yang melintasi berbagai batas ruang dan waktu. Pada saat yang sama, sistem sosial patriarki juga ada. Secara kuantitatif, tidak ada perubahan dalam rasio atau hubungan gender, bahkan jika terdapat pemimpin lingkaran perempuan di seluruh dunia.

C. Pemilihan Kepala Daerah

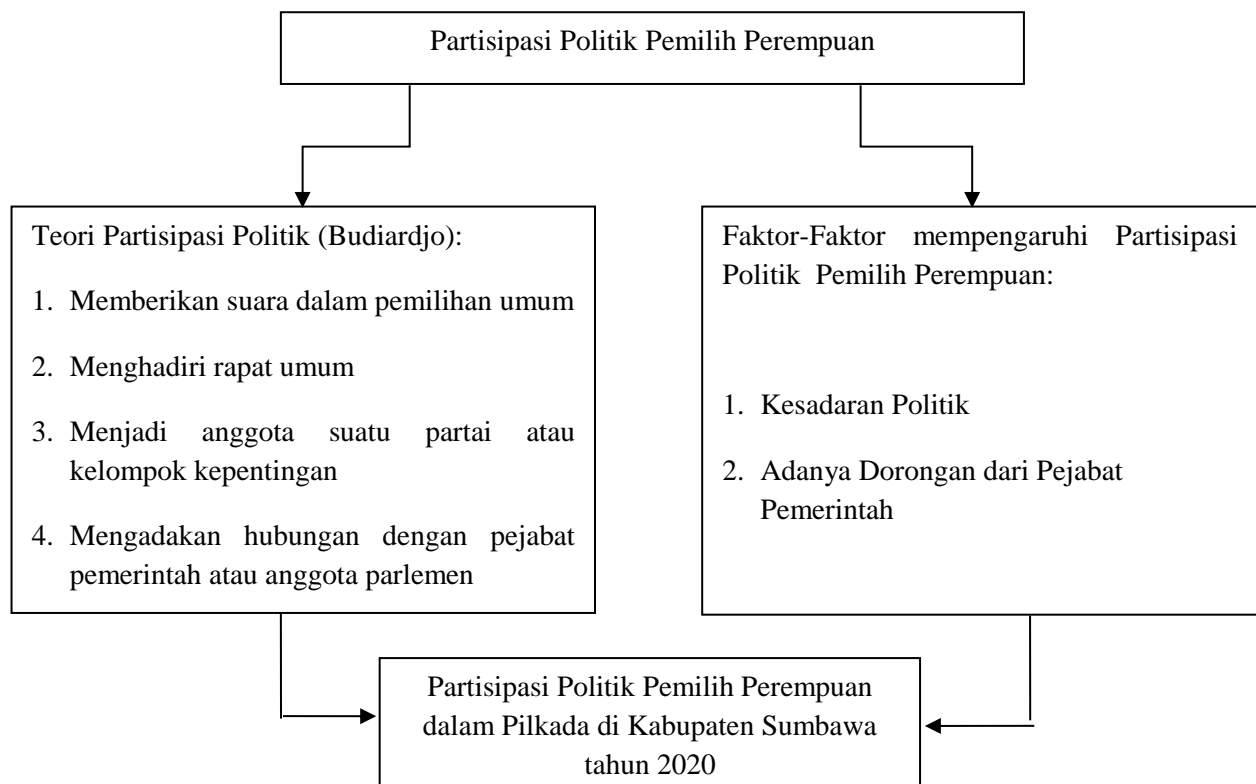
Memilih kepala daerah secara langsung adalah cara demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan preferensinya saat memilih perwakilan di wilayah tersebut. Pelaksanaan Pilkada juga menjadi sarana untuk terlibat dalam aktivitas politik yang berlangsung di Indonesia, sebuah negara yang mengalami perubahan besar setelah jatuhnya Orde Baru. Kualitas kehidupan demokrasi semakin meningkat, di mana masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam aktivitas politik yang sebelumnya sangat terbatas pada era Orde Baru. Pilkada langsung mencerminkan kemajuan dalam proses demokratisasi Indonesia.

Satu bentuk dan proses demokrasi yang diterapkan di wilayah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilu daerah merupakan sarana untuk menunjukkan kedaulatan dan menegaskan bahwa pemilih berasal dari wilayah setempat.

D. Kerangka Berpikir

Partisipasi politik pemilih perempuan dalam Pemilihan Bupati di Sumbawa tahun 2020, pada dasarnya mengarah pada sejauh mana partisipasi politik perempuan dalam memahami makna demokrasi, karena perempuan memerlukan perjuangan yang cukup keras untuk meningkatkan demokratisasi agar terbentuk masyarakat yang adil dan setara dalam peran sosial terutama dalam hal pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik terutama tentang kebijakan perempuan itu sendiri.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian gabungan atau yang lebih dikenal dengan mix method. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara

dan menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemilih perempuan sebanyak 170.780 orang dan metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik *random sampling* serta sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan uji instrument yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabelitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Perempuan

1. Indikator Memberikan Suara Dalam Pemilihan

Berdasarkan instrument pertama yaitu Setiap perempuan yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada 2020 mendapat jawaban sangat setuju sebanyak 195 orang (49%) dari 400 responden. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu No.23 Tahun 2003. Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 juga tinggi, terutama dari instrumen pertama yang digunakan untuk mengukur indikator partisipasi. Banyak perempuan yang ikut dalam memberikan suara pada Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 karena telah mencapai syarat usia untuk memilih.

Pada instrument kedua yaitu setuju untuk menggunakan hak pilih anda pada Pilkada 2020, yang mendapat jawaban sangat setuju sebanyak 179 orang (45%) dari 400 responden. Dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2020, instrumen kedua yang digunakan untuk mengukur partisipasi politik adalah melalui penggunaan hak pilih oleh setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi politik perempuan dalam hal memberikan suara pada Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2020 tergolong tinggi Partisipasi politik perempuan dalam proses pemilihan pimpinan daerah dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan.

Lalu instrument ketiga yaitu setuju menggunakan hak pilih anda pada Pilkada 2020 karena memiliki kesadaran sebagai masyarakat, yang mendapat jawaban sangat setuju sebanyak 186 orang (46%) dari 400 responden, karena sudah menjadi haknya

sebagai masyarakat untuk memilih siapa yang akan memimpin daerahnya. Penggunaan hak suara dalam Pilkada 2020 karena memiliki kesadaran sebagai masyarakat, merupakan instrumen ketiga yang digunakan untuk mengukur indikator partisipasi politik pada Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Dari hasil penelitian, partisipasi politik pemilih perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 cukup tinggi.

Pada instrument keempat yaitu setuju untuk ikut mengawasi proses pengambilan suara pada Pilkada 2020 mendapat jawaban setuju sebanyak 215 orang (54%) dari 400 responden, karena untuk memastikan Pilkada dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan. Dari hasil penelitian, instrumen ini mendapatkan pernyataan sangat setuju dan setuju dari para responden. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat telah menyadari pentingnya mengawasi proses pengambilan suara untuk memastikan keberlangsungan pemilihan yang lancar dan tertib. Dalam konteks ini, partisipasi politik perempuan juga sangat tinggi, terlihat dari dukungan yang diberikan pada instrumen ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara.

Yang terakhir instrument kelima yaitu menggunakan hak pilih pada Pilkada 2020 karena memiliki rasa tanggungjawab sebagai masyarakat, yang mendapat jawaban setuju sebanyak 195 orang (49%) dari 400 responden, karena masyarakat merasa bertanggung jawab dalam memilih pemimpin daerah. Dari hasil riset, partisipasi politik kaum perempuan dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2020 sangat tinggi.

2. Indikator Menghadiri Rapat Umum

Instrument pertama dalam indicator menghadiri rapat umum yaitu setuju perempuan mengikuti setiap kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah, instrumen ini mendapat jawaban tidak setuju sebanyak 165 orang (41%) dari 400 responden, karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan sibuk mengurus rumah. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri rapat umum dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dapat dilihat dari pernyataan tidak setuju dari responden terhadap instrumen pertama. Banyak masyarakat merasa tidak harus

mengikuti setiap kampanye yang dilakukan oleh setiap calon kepala daerah. Oleh karena itu, partisipasi politik individu atau sekelompok orang dalam kehidupan politik masih kurang. Penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam menghadiri rapat umum dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 masih sangat kurang.

Pada instrument kedua yaitu setuju perempuan menjadi panitia pelaksana dalam Pilkada 2020, yang mendapat banyak jawaban tidak setuju sebanyak 185 orang (46%) dari 400 responden, karena kurang memiliki pengalaman untuk menjadi panitia pelaksana Pilkada dan juga jumlah orang yang dapat menjadi panitia pelaksana itu terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam hal menghadiri rapat umum Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 masih rendah.

Lalu instrument ketiga yaitu setuju perempuan menghadiri rapat-rapat kepanitiaan Pilkada demi kelancaran Pilkada, yang mendapat jawaban tidak setuju sebanyak 184 orang (46%) dari 400 responden, karena tidak memiliki pengalaman untuk terlibat dalam kepanitiaan Pilkada. Jika dilihat dari aspek ketiga yaitu mengikuti pertemuan panitia pilkada guna memastikan kelancaran Pilkada 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadiri pertemuan umum terkait Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 masih minim, seperti yang tercermin dari jawaban responden yang tidak setuju.

Instrument keempat yaitu setuju perempuan ikut mensosialisasikan para calon kandidat, yang mendapat jawaban tidak setuju sebanyak 209 orang (53%) dari 400 responden, karena mensosialisasikan calon kandidat adalah tugas dari tim sukses calon kandidat. Dari hasil penelitian, rata-rata responden menyatakan tidak setuju dengan Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Hal ini dapat dipahami karena banyak masyarakat yang tidak aktif dalam memperkenalkan para calon kepala daerah, sehingga mereka hanya mengetahui bahwa ini adalah calon kepala daerah yang akan dipilih pada Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Dalam konteks ini, partisipasi politik perempuan masih sangat kurang.

Instrument terakhir yaitu setuju perempuan menghadiri rapat tim sukses calon Kandidat, yang mendapat jawaban tidak setuju sebanyak 213 orang (53%) dari 400

responden, karena belum pernah ikut menjadi anggota tim sukses seorang kandidat. Berdasarkan hasil studi, partisipasi politik warga dengan menggunakan parameter mengikuti pertemuan umum dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 jika dianalisis dengan alat ukur yang kelima, yakni menghadiri pertemuan tim sukses untuk memastikan kelancaran pemilihan umum, yang dijawab oleh responden dengan jawaban tidak setuju, menandakan bahwa partisipasi politik wanita masih belum memadai.

3. Indikator Menjadi Anggota Suatu Partai Atau Kelompok Kepentingan

Pada instrument pertama yaitu setuju perempuan mengikuti setiap kegiatan politik yang ada guna mensukseskan Pilkada 2020 yang mendapat jawaban setuju sebanyak 174 orang (44%) dari 400 responden, karena karena agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar. Instrumen pertama yang digunakan untuk mengukur partisipasi politik perempuan dalam Pilkada 2020 menunjukkan bahwa antusiasme perempuan di Kabupaten Sumbawa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik cukup tinggi. Hasil penelitian, partisipasi politik perempuan dengan indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam Pilkada 2020 mendapat pernyataan setuju dari responden, memperlihatkan bahwa partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi.

Instrumen kedua yaitu setuju perempuan ikut dalam kegiatan suatu partai, yang mendapat jawaban setuju sebanyak sebanyak 192 orang (48%) dari 400 responden, karena agar dapat menyuarakan hak-haknya sebagai perempuan yang belum terpenuhi. Instrumen kedua yang digunakan untuk mengukur partisipasi politik perempuan dalam suatu partai atau kelompok kepentingan adalah kemampuan perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2020 setuju bahwa perempuan dapat mengambil bagian dalam kegiatan partai. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Sumbawa mempunyai minat tinggi untuk ikut dalam kegiatan politik. Maka, partisipasi politik perempuan dalam hal menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dapat dilihat dari instrumen kedua yaitu kemampuan

perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan partai yang mendapat dukungan dari responden. Kesimpulannya, partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sumbawa cukup signifikan.

Setuju perempuan dapat ikut menjadi tim sukses dalam Pilkada 2020 adalah instrumen ketiga yang mendapat jawaban setuju sebanyak 184 orang (46%) dari 400 responden, karena agar Pilkada 2020 dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Jika dilihat dari aspek ketiga, yaitu wanita dapat turut serta dalam tim sukses Pilkada 2020 yang mendapat persetujuan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa wanita di Kabupaten Sumbawa sangat antusias untuk berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada di wilayah tersebut pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan, partisipasi politik wanita dengan indikator menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, jika dilihat dari perspektif wanita yang dapat bergabung dalam tim sukses Pilkada 2020 yang mendapat persetujuan dari responden, menunjukkan bahwa partisipasi politik wanita di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi.

Instrument keempat yaitu setuju perempuan menjadi anggota partai, yang mendapat jawaban setuju sebanyak 185 orang (46%) dari 400 responden, karena untuk mewakili perempuan agar dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Jika dilihat dari perspektif keempat, yaitu perempuan yang dapat bergabung dengan partai politik, mayoritas responden setuju. Hal ini menunjukkan bahwa minat perempuan di Kabupaten Sumbawa untuk terlibat dalam partai politik cukup tinggi. Penelitian ini menunjukkan, bahwa partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh indikator bergabung dengan partai atau kelompok kepentingan yang memiliki persetujuan dari responden perempuan.

Instrument terakhir yaitu setuju perempuan aktif sebagai anggota partai, yang mendapat jawaban setuju sebanyak 177 orang (44%) dari 400 responden, karena dengan aktif sebagai anggota partai memperbesar peluang untuk mempengaruhi kebijakan. Jika dilihat dari perspektif kelima ini, yaitu wanita yang terlibat aktif sebagai anggota partai, menunjukkan hasil setuju dari responden. Hal ini menunjukkan bahwa wanita di Kabupaten Sumbawa memiliki antusiasme yang tinggi dalam terlibat aktif sebagai anggota partai. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik wanita dalam bentuk keanggotaan partai atau kelompok kepentingan, dilihat dari indikator wanita yang terlibat aktif sebagai anggota partai dan mendapatkan

persetujuan dari responden, menunjukkan bahwa partisipasi politik wanita di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi.

4. Indikator Mengadakan Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah atau Anggota Parlemen

Instrument pertama dari indicator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen yaitu setuju untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020 karena adanya dorongan dari pejabat pemerintah, yang mendapat jawaban setuju sebanyak 183 orang (46%) dari 400 responden, karena pejabat pemerintah juga ikut mendorong masyarakat untuk mengikuti Pilkada 2020. Apabila dilihat dari instrument yang pertama, yaitu ikut serta dalam Pilkada 2020 karena didorong oleh para pejabat pemerintah, yang memperoleh persetujuan dari responden. Dari sini dapat dilihat bahwa para pejabat pemerintah, baik di tingkat daerah maupun desa, memberikan motivasi pada masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada 2020. Penelitian ini menunjukkan, partisipasi politik perempuan yang diukur dengan indikator hubungan dengan pejabat pemerintah yang mendapat persetujuan dari responden menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan cukup tinggi.

Instrument kedua yaitu setuju untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020 karena memiliki hubungan dengan anggota partai pendukung calon kandidat Pilkada 2020, yang mendapat jawaban tidak setuju sebanyak 145 orang (36%) dari 400 responden, karena pemilih perempuan mengikuti Pilkada 2020 bukan karena memiliki hubungan dengan anggota partai pendukung calon kandidat namun karena adanya kesadaran untuk ikut berpartisipasi memilih pemimpin mumpuni untuk daerah. Dari hasil penelitian jika dilihat dari instrument ke-2 yaitu ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020 karena mempunyai ikatan dengan anggota partai yang mendukung calon kandidat Pilkada 2020. Pemilih mengikuti Pilkada 2020 karena kesadaran diri sebagai masyarakat bukan karena mempunyai hubungan dengan anggota partai pendukung calon kandidat.

Memberikan suara pada salah satu calon kandidat Pilkada 2020, karena ingin agar keluarga dimudahkan untuk duduk dikursi pemerintahan, yang mendapat jawaban

tidak setuju sebanyak tidak setuju 119 orang (30%) dari 400 responden, karena bukan ingin agar keluarga dimudahkan untuk duduk dikursi pemerintahan namun karena adanya kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Dari hasil penelitian jika dilihat dari instrument ketiga yaitu memberikan suara pada salah satu calon kandidat Pilkada 2020, karena ingin mempermudah keluarga untuk duduk dikursi pemerintahan yang mendapat jawaban tidak setuju dari responden. Pemilih perempuan mengikuti Pilkada 2020 bukan karena ingin agar keluarga dimudahkan untuk duduk dikursi pemerintahan namun karena adanya kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020.

Pada instrument keempat yaitu Ikut dalam Pilkada 2020 karena adanya hubungan dengan pejabat pemerintah pendukung calon kandidat Pilkada 2020, yang mendapat jawaban tidak setuju sebanyak 146 orang (37%) dari 400 responden, karena mengikuti Pilkada 2020 bukan karena adanya hubungan dengan pejabat pemerintah pendukung calon kandidat namun karena adanya kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020.

Instrumen terakhir yang dipakai untuk menguji indikator mengadakan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen adalah suara yang diberikan oleh setiap orang, yang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat mendapat pernyataan setuju sebanyak 172 orang (43%) dari 400 responden, karena memang fakta jika suara yang diberikan oleh setiap orang akan menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pejabat pemerintah baik di daerah maupun di desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan cukup tinggi, terutama dalam hal menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah yang mendapat persetujuan dari responden.

B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Perempuan

1. Memiliki Kesadaran Politik

Hasil penelitian partisipasi politik Perempuan tentang mengikuti Pilkada 2020 karena memiliki kesadaran sebagai masyarakat penilaian rata-rata dari responden

sebesar 46% sangat setuju, 37% setuju, netral 7%, tidak setuju 7% dan sangat tidak setuju 3% sangat tidak setuju.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum banyak masyarakat perempuan berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 karena memiliki rasa kesadaran sebagai warga negara atau masih memiliki kesadaran politik, yaitu dengan adanya pernyataan rata-rata responden sebesar 46% yang memberikan pernyataan sangat setuju dan ini menunjukkan bahwa masyarakat perempuan masih memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara dengan adanya kesadaran politik di dalam dirinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020.

2. Adanya Dorongan dari Pejabat Pemerintah

Hasil penelitian partisipasi politik perempuan ikut berpartisipasi pada Pilkada 2020 karena adanya dorongan dari pejabat pemerintah mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 5% sangat setuju, 46% setuju, netral 17%, tidak setuju 16% dan 16% sangat tidak setuju.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum masyarakat perempuan memilih karena adanya dorongan dari pejabat pemerintah pada Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020, yaitu dengan adanya pernyataan rata-rata responden sebesar 46% yang memberikan pernyataan setuju dan ini menunjukkan bahwa dorongan dari pejabat pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Contohnya seperti yang terjadi di dusun Pusu pada saat Pilkada yang dilakukan kepala dusun saat ada masyarakatnya yang belum melakukan pemilihan maka orang tersebut akan dipanggil Namanya dengan pengeras suara sehingga yang dipanggil Namanya dapat segera hadir dan dapat melakukan pemilihan.

KESIMPULAN

1. Keterlibatan politik perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan, terlihat dari pemilih wanita yang lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Selain itu, tingkat partisipasi perempuan dalam hal menggunakan hak suara dalam pemilihan dan menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan juga cukup tinggi. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal menghadiri rapat umum dan menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang hanya berpartisipasi dalam memberikan suara dalam kegiatan pemilihan. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa persentase partisipasi dalam memberikan suara dan menjadi anggota partai mencapai 42% dan 46%, sementara persentase partisipasi dalam menghadiri rapat umum dan menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen hanya sebesar 9,35% dan 6,7%.
2. Faktor yang memengaruhi keterlibatan politik wanita adalah kesadaran politik dan dorongan dari pejabat pemerintah yang mendapat persetujuan sebesar 46,5% dan 45,75%. Juga dilihat dari hasil wawancara dimana pemilih berpartisipasi dalam Pilkada 2020 karena adanya kesadaran diri dan adanya upaya yang dilakukan oleh pejabat setempat yang mampu mendorong masyarakatnya agar ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Ini menunjukkan bahwa kedua instrument tersebut sangat mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020.

SARAN

Adapun saran penelitian ini, yaitu:

1. Membuat strategi untuk memaksimalkan partisipasi politik pemilih perempuan tidak hanya dengan memberikan suara dalam pemilihan dan menjadi anggota suatu partai, namun ikut juga berpartisipasi untuk mengikuti rapat umum maupun membuat hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.
2. Kesadaran dan dorongan agar masyarakat lebih aktif untuk ikut partisipasi politik harus lebih ditingkatkan lagi untuk pemilihan berikutnya.
3. Dorongan pejabat pemerintah di Kabupaten Sumbawa belum maksimal, dalam hal ini pejabat pemerintah baik kepala Daerah maupun kepala Desa perlu meningkatkan

kesadaran masyarakatnya akan hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar – dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat IMB SPSS*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, R & Lalongan, M. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat : Teori dan Praktik*. Makasar: CV Sah Media.
- Iskandar & DKK. 2021. *METODE PENELITIAN CAMPURAN (Konsep, Prosedur dan Contoh Penerapan)*. Pekalongan: PT. NEM
- Rasyidin, & Aruni, F. 2016. *GENDER DAN POLITIK Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Aceh :UNIMAL Press.
- Raden, S & Dkk. 2019. *PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)*. Yogyakarta: Cakrawala.